



Perda Direvisi, Zona Kawasan Ditambah Tarif Parkir 'Nuthuk', Rusak Citra Yogya

YOGYA (KR) - Selain terbatasnya areal parkir, seringnya terjadi pelanggaran tarif dengan biaya sangat tinggi di luar kewajaran alias *nuthuk*, merupakan permasalahan perparkiran yang seringkali muncul di Kota Yogyakarta. Warga seringkali menumpahkan kekesalannya di media cetak maupun media sosial karena tarif parkir yang tidak wajar, hingga mencapai puluhan ribu rupiah.

Keluhan tarif parkir yang selalu terjadi setiap tahun ini juga menjadi persoalan serius bagi aparat pemerintah. Selain mengintensifkan tindakan represif, dari sisi regulasi kini juga tengah dibahas revisi Perda Parkir. Salah satu kajian utamanya usulan penambahan zona kawasan parkir.

Revisi Perda Parkir itu pun dijadikan prioritas pembahasan di DPRD Kota Yogya. Proses pembahasannya sudah memasuki tahapan pandangan tiap-tiap fraksi dan akan dilanjutkan kajian di internal Panitia Khusus (Pansus). "Setiap keluhan maupun laporan dari pengguna jasa, langsung kami tindaklanjuti. Penertiban tetap jalan, kemudian regulasinya juga kami perbarui," ungkap Kepala Dinas Perhubungan

Kota Yogya Wirawan Haryo Yudo.

Diakuiinya, hal paling mendasar dalam revisi Perda Parkir kali ini menyangkut zona kawasan parkir. Terutama penambahan zona ka-

wasan dari sebelumnya dua zona menjadi tiga zona. Masing-masing Zona Kawasan I untuk Area Wisata, Zona Kawasan II untuk Area Komersil, dan Zona Kawasan III untuk Area Nonkomersil.

Penambahan kawasan parkir tersebut ditujukan untuk mengakomodasi perkembangan yang ada di Kota Yogya. Zona baru yang ditambahkan ialah kawasan wisata. Dengan begitu, kelak

ada kepastian tarif bagi masyarakat yang hendak parkir di kawasan tersebut.

Di samping itu, kelak hal-hal teknis di tiap zona juga akan diatur secara khusus

* Bersambung hal 7 kol 1

	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
.....	☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
.....	☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
.....	☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Tarif

dalam Peraturan Walikota. Salah satu contohnya penerapan tarif progresif di kawasan wisata. "Itu masih sebatas usulan dari kami. Nanti keputusan akhirnya berada dalam pembahasan di Pansus," katanya.

Karena itu, tidak menutup kemungkinan akan ada perbedaan mencolok terkait besaran tarif parkir di tiap zona. Hal ini dinilai wajar karena ketersediaan lokasi parkir yang terbatas sehingga tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang mengakses. Hanya, detail atau teknis penerapannya sudah menjadi kewenangan Pansus.

Wirawan mengaku, dari hasil pendataan serta penertiban tarif parkir, pelanggaran kerap terjadi di lokasi larangan parkir. Terutama setelah pengendara tidak kebagian lokasi di tempat khusus parkir, sehingga diarahkan ke lokasi yang sebetulnya masuk area larangan. "Kami juga akan membenahi sistem informasi layanan parkir. Terutama pemanfaatan screen digital di tiap traffic light guna menginformasikan alternatif lokasi parkir. Seperti saat Taman Parkir Senopati sudah penuh, pengendara akan diberikan alternatif di Ngabean atau lokasi lainnya yang masih kosong," urainya.

Sejumlah fraksi di DPRD Kota Yoga memiliki pandangan beragam atas persoalan perpajakan. Salah satunya Fraksi Gerindra yang menilai urusan parkir layak dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini seiring potensi retribusi yang cukup besar, namun realisasinya kurang optimal.

Ketua Fraksi Gerindra Novi Alissa Semendawai memaparkan, dari sisi sosial hampir setiap hari selalu muncul keluhan pengguna jasa parkir yang menjadi viral di media sosial. Sedangkan dari sisi ekonomi, retribusi yang berhasil dipungut oleh pemerintah belum sepenuhnya faktual.

Karena itu, pihaknya menyarankan supaya pengelolaan parkir dibuat terpisah. Yakni tidak lagi ditangani Dinas Perhubungan, melainkan pihak ketiga atau BUMD. Dengan begitu, pengelolaan parkir diharapkan bisa semakin profesional. Dari sisi retribusi akan dikejar target, sedangkan unsur pelayanan wajib memiliki standar.

Sedangkan Fraksi PKS justru memiliki

usulan berbeda dalam menekan kebocoran retribusi parkir. PKS mencontohkan beberapa daerah di Bali yang menerapkan karcis parkir berhadiah. Cara tersebut mampu mendorong pengguna jasa parkir dalam meminta karcis ke juru parkir. "Pengguna jasa parkir yang tidak meminta karcis juga tidak bisa dibenarkan karena menjadi celah terhadap terjadinya pelanggaran tarif maupun kebocoran retribusi. Sehingga, karcis parkir berhadiah bisa dijadikan salah satu solusi guna mengajak masyarakat untuk memarkir kendaraan di lokasi resmi sekaligus meminta karcis," urai Ketua Fraksi PKS M Fauzan.

Tim Saber Pungli

Kepala Dinas Pariwisata DIY Aris Riyanta membenarkan, penanganan dan pengaturan perpajakan di kawasan pariwisata merupakan kewenangan Pemkab/Pemkot setempat. Bantuan pengatasan masalah tersebut dalam jangka menengah dan panjang sebaiknya dilakukan dengan perencanaan yang terukur dan memunculkan kolaborasi baik Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Pemda dan swasta serta kelompok masyarakat yang akan diberdayakan, sehingga harmoni dan bersinergi serta berkontribusi ikut membangun daerah. "Jika yang terjadi biaya parkir yang melebihi aturan yang telah ditetapkan, itu masuk pungutan liar (Pungli), jadi jangka pendek mungkin Tim Saber Pungli di kabupaten/kota masing-masing bisa dioptimalkan. Hal ini sebagai upaya preventif agar tidak terjadi potensi pungli di kawasan wisata yang bisa memperburuk citra pariwisata DIY nantinya," ujar Aris.

Aris mengatakan, pihaknya sudah sering dan secara periodik melakukan bimbingan teknis (Bimtek) kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) maupun pengelola destinasi wisata agar menerapkan Sapta Pesona, termasuk pelaku/pegiat wisata. Contohnya di Kawasan Malioboro yang berada di bawah Pemkot Yogyakarta sudah memiliki UPT Malioboro hingga Jogo Boro dan kelompok komunikasi lainnya yang sekiranya bisa menjadi model dalam pengaturan kawasan wisata, agar wisatawan betul-betul merasa aman dan nyaman serta tidak banyak komplain atau keluhan.

Sambungan hal 1

"Optimalkan perangkat yang sudah ada karena regulasi dan monitoring perpajakan memang ranah kabupaten/kota. Kita tidak bisa langsung intervensi, yang jelas jangan ada pembiaran kasus pungli di perpajakan terus berulang," tandas Aris.

Ketua Asita DIY Udhil Sudhiyanto kembali menyayangkan terjadinya permasalahan parkir di Kota Yogyakarta. Karena hal ini akan memberikan citra yang tidak baik bagi pariwisata dan wisatawan akan merasa tidak nyaman dengan kejadian ini. "Saya sangat menyayangkan terjadinya permasalahan parkir di Kota Yoga. Kita harus bersama-sama memberi edukasi bahwa kedatangan wisatawan ke Yogyakarta sangat diperlukan, sebab dari wisatawanlah salah satu roda ekonomi di Yogyakarta bisa berjalan," kata Udhil.

Kota Budaya

Asita DIY mengharapkan pihak berwenang bersikap tegas untuk menangani hal ini agar jangan sampai dibiarkan terjadi berulang-ulang. Sebuah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan bersama-sama oleh pemerintah, pelaku pariwisata maupun masyarakat. Perlu disadari bagi wisatawan keamanan dan kenyamanan adalah wajib hukumnya. Jadi apabila mereka harus membayar dengan sangat mahal tentu wisatawan akan merasa tidak nyaman. Apalagi disuruh pergi dari tempat parkir dengan bahasa yang tidak baik dan kasar, hal ini akan makin membuat wisatawan tidak aman dan nyaman sekali.

"Marilah kita kembali ke citra kita sebagai kota budaya dan tunjukkan budaya orang Yogyakarta adalah budaya dengan keramahan dan jujur. Kami sekaligus menyarankan kepada wisatawan untuk parkir di tempat yang telah disediakan, tentu dengan harapan mereka tidak dikenai retribusi parkir seandainya lagi," tegasnya.

Seorang juru parkir di depan Kantor Pos Besar Yogyakarta, Sutarto mengatakan, munculnya tarif parkir tidak sesuai ketentuan baru terjadi beberapa tahun terakhir. Terlebih setelah area parkir motor di kawasan Malioboro dipindah. "Memang disayangkan kalau ada tukang parkir yang mengenakan tarif tidak wajar," tutur Sutarto.

(Dhi/ra/M-10)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005